

PROBLEMA PENGELOLAAN MADRASAH DI ERA MODERN

Lailatul Maskhuroh¹

A. Pendahuluan

Madrasah adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang penting di Indonesia, selain pesantren. Keberadaan madrasah begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dengan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian penting dari institusi pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan *output* generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah, mengingat sebelumnya eksistensi institusi ini kurang diperhatikan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terjadi justru sebaliknya, madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan dari institusi-institusi dalam sistem pendidikan nasional lainnya.

Dalam perkembangan, madrasah yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, secara perlahan-lahan telah mampu memperoleh perhatian dari masyarakat. Apresiasi ini menjadi modal besar bagi madrasah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dalam konteks kekinian, sekarang banyak sekali madrasah yang menawarkan konsep pendidikan modern. Konsep ini tidak hanya menawarkan dan memberikan pelajaran atau pendidikan agama, namun mengadaptasi mata pelajaran umum yang diterapkan di berbagai sekolah umum. Kemajuan madrasah tidak hanya terletak pada kualitas SDM-nya saja, namun juga desain kurikulum yang lebih canggih dan sistem manajerial yang modern. Selain itu, perkembangan kemajuan madrasah juga didukung dengan sarana infrastruktur dan fasilitas yang memadai

¹Dosen STIT Urwatul Wutsqo Bulurejo Jombang dan STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri.

sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Di lain pihak, arus globalisasi dan modernisasi cenderung mengkhawatirkan kehidupan bangsa. Apalagi dengan kebudayaannya yang heterogen dari Sabang sampai Merauke. Hal itu dikarenakan semakin deras arus informasi komunikasi yang cenderung negatif dan masif.

1. Jenis Madrasah di Indonesia Era Modern

Madrasah mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad V Hijriyah atau abad X Masehi. Pada masa itu ajaran agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam mazhab atau pemikirannya. Pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an dan hadis, seperti ilmu-ilmu al-Qur'an, hadits, fiqh, ilmu kalam, maupun ilmu tasawwuf tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan.²

Aliran-aliran yang timbul akibat dari perkembangan tersebut saling berebutan pengaruh di kalangan umat Islam, dan berusaha mengembangkan aliran dan mazhabnya masing-masing. Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian kelompok pikiran, mazhab atau aliran. Itulah sebabnya sebahagian besar madrasah didirikan pada masa itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang masyhur pada masanya, misalnya madrasah Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah atau Hanbaliyah.³ Dan demikian pula di Indonesia, baik pada masa pra kemerdekaan RI maupun pasca Kemerdekaan RI di tahun 1945. Karena terbebas dari tekanan kolonial, madrasah-madrasah di negeri ini di mulai bergeliat pada masa itu (Orde Lama), walaupun belum terorganisir dan tersitem. Baru kemudian pada masa orde baru, madrasah mulai jelas arah dan pengelolaanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

²Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 161.

³Ibid, 68.

Pada masa Orde Baru pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/4 1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama.⁴

Pemerintah Orde Baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, penegasan *definitif* tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa Madrasah berkembang secara terpadu dalam system pendidikan nasional.⁵

Pada masa Orde Baru ini madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah keatas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 (jenjang) pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut :

1) Raudatul Atfal (Bustanul Atfal) atau RA/BA

Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal terdiri dari 3 tingkat :

- a. Tingkat A untuk anak umur 3-4 tahun
- b. Tingkat B untuk anak umur 4-5 tahun
- c. Tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun

⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve,1993), 109.

⁵Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 130-131.

2) Madrasah Ibtidaiyah atau MI

Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

3) Madrasah Tsanawiyah atau MTs

Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

4) Madrasah Aliyah atau MA

Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan : Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya.

5) Madrasah Diniyah atau Madin

Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah ini terdiri 3 tingkat :

- a. Madrasah Diniyah Awaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan kelas 4 dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dan seminggu.
- b. Madrasah Diniyah Wusta ialah Madrasah Diniyah tingkat pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.

- c. Madrasah Diniyah Ula ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jumlah jam pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu.⁶

Era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya, atau pendidikan Islam, termasuk pesantren dan Madrasah khususnya. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi, bahwa masyarakat muslim tidak bisa menghindari diri dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin *survive* dan berjaya ditengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad XXI.⁷

Globalisasi yang berlangsung dan melanda masyarakat muslim Indonesia sekarang ini menampilkan sumber dan watak yang berbeda. Proses globalisasi dewasa ini tidak bersumber dari Timur Tengah, melainkan dari barat, yang terus memegang supremasi dan hegemoni dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Dominasi dan hegemoni politik barat dalam segi-segi tertentu mungkin saja telah “merosot”, khususnya sejak terakhirnya perang dunia kedua, dan “perang dingin” belum lama ini, tetapi hegemoniekonomi dan sains-teknologi barat tetap belum tergoyahkan. Meski muncul beberapa kekuatan ekonomi baru, seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi “kultur” hegemoni ekonomi dan sains teknologinya tetap sarat dengan nilai-nilai Barat.⁸

Disini agaknya teori “*center pereferi*”, yang belakangan ini seolah-olah kehilangan pamornya, ternyata masih relevan untuk menggambarkan dinamika globalisasi muslim, termasuk kaum Barat dengan masyarakat- masyarakat muslim, termasuk kaum muslimin Indonesia Barat, lebih khusus lagi Amerika Serikat, adalah “center” (pusat) yang menjadi sumber acuan dan masyarakat- masyarakat muslim adalah “periferi” (pinggiran) yang kurang

⁶Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 234-239.

⁷Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), 43.

⁸Ibid, 44.

atau tidak, akan terseret ke pusat, dengan biaya sosio-kultural yang tidak sedikit, yang terjadi sebenarnya adalah imperialisme kultural (*cultural imperialism*) pusat terhadap wilayah pinggiran (periferi).⁹

Melihat begitu derasnya pengaruh barat yang mengarah pada hegemoni terhadap masyarakat muslim dalam segala aspek kehidupannya, maka madrasah harus segera berbenah diri. Madrasah sebagai institusi pendidikan yang konsen dan inten dalam usaha transformasi nilai-nilai Islam harus dapat menampilkan perannya sebagai *counter* terhadap imperialisme kultural (*cultur imperialism*) yang sedang gencar-gencarnya menyerbu dunia timur (masyarakat muslim) khususnya di Indonesia.

B. Sejarah Ringkas Modernisasi Madrasah di Indonesia

Sejatinya madrasah dalam peta dunia pendidikan di Indonesia bukanlah suatu lembaga yang *indegenous* (pribumi). Setidaknya hal ini dapat dilihat dari kata "*madrasah*" itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia, yakni "sekolah", (kata ini juga sebenarnya bukanlah kata asli Indonesia melainkan bahasa Inggris "*school* ataupun *scola*", namun kata ini dialihkan dan di bakukan menjadi bahasa Indonesia.¹⁰

Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya adalah, di madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madsarah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah ini mempunyai konotasi spesifik, yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan agama. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan

⁹Ibid, 45.

¹⁰A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan, 1999), 18.

perjalan peradaban bangsa mengalami perubahan dalam materi pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya, madrasah dalam kegiatan pembelajarannya mulai menambah dengan mata pelajaran umum yang tidak melepaskan diri dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.¹¹

Pada dasarnya madrasah dengan pondok pesantren tidak jauh berbeda, masing-masing mempunyai model dan tujuan yang sama dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam catatan sejarah madrasah lahir dari lingkungan pondok pesantren, atau dengan kata lain madrasah adalah perluasan dan pengembangan pendidikan dari pondok pesantren yang mempunyai misi untuk mencerdaskan anak bangsa yang pada saat itu belum ada keinginan untuk tinggal atau menginap di pondok dalam proses belajarnya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari para pendiri awal lembaga pendidikan Madrasah yang sebagian besar didirikan oleh para Ulama yang menjadi pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren pada lembaganya masing-masing. Diawali oleh Syekh Amrullah Ahmad (1907) di Padang mendirikan Madrasah, KH. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Wahab Hasbullah bersama KH Mansyur (1914) dan KH. Hasym asy'ari yang pada tahun 1919 mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.¹²

Institusi ini memang lahir pada kurun awal abad 20 M, yang saat itu dapat dianggap sebagai periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.¹³ Memasuki abad 20 M, banyak orang-orang Islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia, apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Munculnya kesadaran kritis tersebut di kalangan umat Islam di Indonesia

¹¹Ibid, 19.

¹²Abdul Rachman Saleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta : PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), 112.

¹³Maksum, *Madrasah*, 98.

tidak bisa dilepaskan dari kiprah kaum terdidik lulusan pendidikan Mesir atau Timur Tengah yang telah banyak menyerap semangat pembaruan (*modernisme*) di sana, sekembalinya ke tanah air mereka melakukan pengembangan pendidikan baru yang lazim disebut madrasah dengan menerapkan metode dan kurikulum baru.¹⁴

Munculnya madrasah menurut para sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Alasannya adalah secara historis awal kemunculan madrasah dapat dilihat pada dua situasi; adanya pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.¹⁵ Dari sini dapat diartikan bahwa munculnya madrasah mengandung kritik pada lembaga pendidikan sebelumnya, yakni pondok pesantren. Dapat dikatakan munculnya madrasah sebagai usaha untuk pembaruan dan menjembatani hubungan antara sistem tradisional (*pesantren*) dengan sistem pendidikan modern. Dan hal ini juga merupakan sebagai upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di pondok pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah yang umum. Maka tak heran belakangan banyak bermunculan madrasah dilingkungan pondok pesantren.

Selain bentuk dari kritikan atas pesantren, Berdirinya madrasah pada lingkungan pondok pesantren ini awal mulanya adalah untuk menampung keinginan dari para santri yang tidak hanya ingin mengaji semata namun juga ingin sekolah pada lembaga pendidikan formal yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ijazah. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa wilayah di pulau jawa, madura, sumatera dan kalimantan yang banyak sekali bermunculan madrasah pada lingkungan pondok pesantren.

Banyaknya madrasah yang bermunculan pada lingkungan pondok pesantren ini, kemudian oleh Mukti Ali sering disebut dengan Madrasah dalam Pesantren.¹⁶ Kemudian dalam perkembangannya model madrasah yang seperti ini sering di istilahkan sebagai

¹⁴Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press, 2009), 71.

¹⁵Maksum, *Madrasah*, 82.

¹⁶A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 11-12.

Madrasah Berbasis Pesantren.¹⁷ Maraknya madrasah pada lingkungan madrasah, menurut Steenbrink, tidak serta merta kemudian menghapus tradisi pesantren yang sudah ada dan bertahan lama, hal ini setidaknya dapat dilihat dari tradisi-tradisi keagamaan, tradisi intelektual dan tradisi kepemimpinan khas pesantren masih banyak di temukan pada madrasah yang berada di lingkungan pesantren.¹⁸

Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural.¹⁹ Oleh karenanya timbul kebanggaan terhadap madrasah, karena lembaga ini mempunyai citra "eksklusif" dalam penilaian masyarakat. Karena dalam catatan sejarah, madrasah pernah menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam, hal ini terjadi karena kedudukannya yang sedemikian prestisius di mata umat Islam. Melalui lembaga ini, dinamika intelektual-keagamaan mencapai puncaknya, kendati memang eksistensinya belum bisa terlepas sepenuhnya dari kepentingan politik penguasa.

Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Badan Pekerja Nasional Pusat (BPNIP) sebagai badan legislatif pada saat itu, dalam pengumumannya tertanggal 22 Desember 1945 (berita RI tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1) berbunyi, " *Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar-langgar dan madrasah tetap berjalan terus dan dipercepat*". Setelah pengumuman di bacakan, BPNIP memberi masukan kepada pemerintah saat itu agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materil dari pemerintah guna memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada lembaga tersebut,

¹⁷Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan Islam*, 89.

¹⁸Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta : LP3ES, 1994), 220.

¹⁹M. Munir Mursi, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, seperti dikutip Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan Islam*, 69.

karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

Guna merespon apa yang telah diumumkan dan masukan dari BPNIP kepada pemerintah yang terbentuk, maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah membentuk kementerian Agama, kementerian yang baru ini dalam struktur organisasinya pada bagian C memuat tentang tugas pada bagian pendidikan adalah mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan masalah-masalah pendidikan di sekolah agama (madrasah dan pondok pesantren). Dan tidak lama kemudian Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh KH. A. Wahid Hasyim mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946 tentang pemberian bantuan kepada madrasah yang kemudian di sempurnakan dan terakhir dengan peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada Perguruan Agama Islam. Kemudian guna mengantisipasi adanya dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, maka Menteri Agama pada saat itu mengajukan kepada semua madrasah untuk memasukan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah, yaitu, pelajaran membaca dan menulis, ilmu hitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olah raga.²⁰

Kemudian guna memajukan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral, kementerian Agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden no. 15 Tahun 1974 pada sidang kabinet terbatas tertanggal 26 November 1974. adapun substansi dari SKB tersebut adalah, *Pertama*, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. *Kedua*, lulusan

²⁰Ibid, 113.

madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Dan *Ketiga*, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.²¹

Setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang penuh dengan dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Undang-undang sisdiknas tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti, UAN, KBK dan KTSP juga berlaku bagi madrasah.

Kalau kita lihat dari sejarah sosial pendidikan, dinamika munculnya madrasah adalah merupakan manifestasi dari perubahan tuntutan sosial umat Islam dari waktu ke waktu untuk menuntut adanya kualitas pendidikan yang baik dan bermutu dengan tidak melepas pada akarnya yakni sistem pendidikan pondok pesantren. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah yang ada untuk peduli dan memperhatikan eksistensi dari lembaga pendidikan yang asli pribumi (Pondok Pesantren) dengan lembaga yang merupakan hasil dialektika antara pendidikan tradisional dengan pengaruh pendidikan modern barat, yakni madrasah, kita perlu jujur bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam ini sampai sekarang masih tergolong kelas rendah dengan mutu dan kualitas yang jauh berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Ia harus mendapat dukungan penuh dari pelbagai sumber, terutama pemerintah yang dalam pemberian dukungannya harus steril dari aroma politik dan ekonomi, agar lembaga pendidikan Islam ini bisa terus eksis mendampingi dan mengawal perjalanan bangsa di kemudian harinya.

C. Persaingan Antara Madrasah dan Sekolah Islam di Era Modern

²¹Ibid, 114.

Sekolah Islam yang dimaksudkan di sini adalah bukan lembaga pendidikan pesantren atau madrasah seperti yang selama ini dikenal memiliki otoritas penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan tersebut lebih bercorak sekolah umum yang lebih berorientasi pada penyelenggaraan pendidikan umum, namun dilandasi dengan nuansa keislaman yang kuat.²²

Sekolah ini tergolong dalam kategori lembaga pendidikan Islam karena beberapa sifat dan cirri-cirinya seperti disebutkan A. Malik Fadjar berikut ini: (1) menggunakan label Islam yang dilekatkan pada nama lembaganya; (2) landasan penyelenggaraannya didasarkan pada komitmen keislaman, atau (3) program-program pendidikan yang dijalankan didasarkan pada pengembangan nilai-nilai keislaman.²³ Sifat-sifat inilah yang melekat pada yang melekat dalam penyelenggaraan pendidikannya sehingga lembaga pendidikan ini benar-benar mencerminkan nuansa keislaman dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berbicara tentang criteria lembaga pendidikan Islam, Zarkawi Soejoeti dalam A. Malik Fadjar menyebutkan pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian; *Pertama*; Lembaga pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya di dorong oleh Hasrat pengejawantahan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*; lembaga yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu-ilmu lain. *Ketiga*; mengandung kedua pengertian di atas, dalam arti bahwa lembaga pendidikan tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai, bagi sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya.²⁴

Ada beberapa hal yang menjadi persaingan antara madrasah dengan sekolah Islam, diantaranya:

²²Halfian Lubis, *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia* (Jakarta : Balitbang Depag RI, 2008), 82.

²³A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), 31.

²⁴Ibid.

1. *Pengelolaan Manajemen*

Sekolah atau madrasah yang berkualitas memang senantiasa mengorientasikan diri pada pencapaian mutu pendidikan. Dalam konsep yang lebih berkembang sekarang ini bahwa mutu pendidikan lebih banyak ditentukan oleh madrasah/sekolah. Mutu pendidikan bukan ditentukan dari luar sekolah, melainkan dari dalam sekolah. Oleh karenanya peran kepala sekolah, guru-guru, dan staf serta komite menjadi lebih penting dan menentukan.

Terkait dengan konsep pengembangan mutu pendidikan, SMA Islam atau pun madrasah berpacu dalam mengembangkan konsep *Total Quality Management* (TQM),²⁵ Konsep ini menekankan pada upaya pencapaian kualitas pendidikan yang dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan yang diinginkan. Konsep ini juga memandang perlunya melakukan upaya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Prinsip utama dalam TQM sebagaimana yang dicirikan manajemen sekolah unggulan Islam adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap program yang dijalankannya serta menjalankan untuk memperbaikinya. Sedangkan karakteristik dari konsep ini bahwa setiap orang dalam lembaga tersebut terlibat dalam pekerjaan perbaikan yang berkelanjutan, dan setiap orang berperan menjadi manajer dari apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara kualitatif banyak madrasah yang tidak bisa bersaing dari sekolah Islam, Ada memang madrasah yang cukup berkualitas, bahkan mungkin lebih baik dari sekolah Islam, tetapi tetap saja jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah madrasah secara keseluruhan. Di sisi lain, rendahnya kualitas ini juga terindikasi dari

²⁵*Total Quality Management* (TQM) adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mencapai tingkat kualitas yang sesuai, yang memenuhi atau melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan. TQM menekankan kepada inovasi, perbaikan dan perubahan. Sekolah atau madrasah yang melaksanakan sistem ini terlibat dalam suatu siklus perbaikan yang berkelanjutan. Mereka melakukan usaha sadar untuk menganalisis kegiatan yang dikerjakannya dan merencanakan untuk memperbaikinya. Baca Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 19.

rendahnya persentase siswa madrasah yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi Favorite. Menurut catatan Departemen Agama (2007), sekarang Kementerian Agama, jumlah MI sebesar 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta; MTs. 12.054 lembaga, 90 persen di antaranya swasta; dan MA sebesar 4.687 lembaga, 86 persen di antaranya swasta. dapat kita bayangkan, bahwa madrasah negeri sekalipun masih belum optimal dalam menyelenggarakan pendidikan apalagi madrasah swasta yang mengatur diri sendiri atau independen dalam semua hal. Akibat dari manajemen yang tidak mantap berdampak pada:

- Sistem rekrutmen tenaga pengajar dan siswa sekadarnya.
- Pemamfaatan sarana dan media pendidikan belum optimal.
- Pengembangan inovasi pendidikan dan metodologi pendidikan statis.
- Pembinaan sumberdaya guru yang berkelanjutan belum optimal.
- Pengembangan emotional dan spiritual quotients dari masyarakat madrasah belum maksimal tersentuh.

2. *Membangun Tatanan Sosiokultural*

Aspek terpenting dan menarik sebagaimana yang dikembangkan oleh SMA Islam unggulan adalah membangun tatanan sosio cultural sekolah. Ada dua criteria yang dapat dicirikan dalam masalah ini; *Pertama*, kultur yang dibangun dalam rangka mendukung tercapainya kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan kesiapan mental semua warga sekolah. *Kedua*, tatanan sosio cultural yang bernuansa Islami. Tata pergaulan antar warga sekolah dan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Kedua aspek ini terpadu dalam tatanan sosio-kultural sekolah.

Diantara ciri-ciri lingkungan sekolah/madrasah yang islami di bidang lingkungan fisik, meliputi; 1) lingkungan madrasah/sekolah terawat baik dan indah,

2) ruangan kantor tertata rapi dan bersih, 3) kantin dalam keadaan bersih, 4) toilet siswa dan guru bersih, 6) peralatan belajar tertata rapi, 7) meja guru rapi dan bersih, 8) meja belajar siswa tertata rapi dan bersih, 9) guru dan siswa berpakaian rapi dan islami, 10). Keamanan sekolah terjaga dengan baik.

Sedangkan kegiatan non fisik yang dapat kitasaksikan antara lain, program sholat berjamaah, pergaulan guru-siswa didasarkan nilai-nilai islami, budaya senyum, sapa salam, dan berpakaian Islami.

Program-program fisik dan non fisik tersebut, oleh madrasah secara perlahan-lahan tapi pasti telah digulirkan dengan membangun madrasah model yang fasilitas pendidikannya tidak kalah dengan sekolah Islam. Walaupun secara kuantitas jumlah madrasah model yang dikelola oleh pemerintah jumlahnya masih sedikit. Akan tetapi beberapa yayasan non pemerintah juga memiliki andil yang sangat signifikan dalam menyelenggarakan madrasah berstandar nasional bahkan internasional dengan berbagai program unggulan baik yang materi agama maupun umum.

3. Orientasi pada Penguasaan Ilmu Pengetahuan

Salah satu obsesi penyelenggaraan SMA Islam adalah penguasaan ilmu-ilmu dasar di bidang sains. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan. Bidang-bidang sains seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi mendapat tempat yang istimewa dan dijadikan wilayah yang strategis dalam kurikulum pendidikan, bahkan menjadi target utama dalam orientasi pendidikannya. Tidak heran jika program pembelajaran, termasuk pengadaan sarana pendidikan diarahkan pada tujuan yang dapat menunjang bidang sains ini.

Madrasah pun tidak mau ketinggalan, dengan adanya penyempurnaan kurikulum 70% pendidikan umum dan 30% agama yang diberlakukan di madrasah sebagai ciri sekolah yang berciri khas islam, telah memfokuskan pelajaran MAFIKIB

(matematika, fisika, kimia dan Biologi), untuk dikaji oleh siswa secara mendalam. Tentu dengan berbagai strategi dan pendekatan untuk meningkatkan kualitas out put siswa-siswinya.

4. Membangun Jaringan dengan Lembaga Lain

Hal yang sangat menarik dari pemberdayaan sistem pendidikan Islam adalah memiliki pandangan yang sangat visioner dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Sekolah Islam sangat terbuka dalam membangun inter-relasi dan intraksi dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dengan sekolah/madrasah negeri maupun swasta. Kontak hubungan ini dibangun dalam berbagai even-even lomba, pertemuan MGMP, penataran, maupun hubungan lain yang bersifat fungsional. Dampak dari jaringan hubungan ini melahirkan pola pengembangan yang demikian dinamis dalam intern kelembagaannya.

Madrasah pun telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Dan hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan di era globalisasi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan madrasah tidak terisolasi dalam dunianya sendiri, bahkan mampu berkompetisi dalam persaingan kualitas dengan sekolah umum lainnya.

D. Analisis Problema dan Alternatif Pemecahannya

1. Pendidikan yang Dililit Berbagai Keterbatasan

Bukan rahasia umum lagi bahwa pada umumnya pendidikan madrasah itu diselenggarakan dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana dan dukungan finansial (dana). Kedua kondisi ini menjadi factor sangat menonjol pada pendidikan madrasah, walaupun pemerintahan saat ini mengalokasikan dana pendidikan 20 persen, dan banyak pula ditemui madrasah dengan kondisi sarana dan prasarana yang

melebihi sekolah umum. Namun masih banyak ditemui di berbagai tempat proses kegiatan pembelajaran di madrasah, khususnya pada madrasah swasta, yang diselenggarakan di dalam gedung madrasah dengan dinding dari papan atau anyaman bambu serta dengan ruang kelas yang kusam, kumuh dengan sarana belajar seadanya.

Di samping itu pula, banyak di antara guru yang mengajar dengan mengharap honorarium “PAHALA” di akhirat, dan atau adapula yang menerima gaji berkisar antara 250.000 s/d 300.000 per bulan bersumber dari dana sumbangan wali murid, zakat, sedekah masyarakat dan lain-lain. Sebuah penghasilan yang tidak bisa diandalkan sebagai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari yang layak. Dalam kenyataannya penghasilan yang ada itu kemudian hanya bisa menutupi transportasi mengajar. Dapat dibayangkan kualitas output pendidikan yang dihasilkan oleh madrasah seperti ini. Berbeda halnya dengan madrasah yang negeri, mulai dari biaya penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sampai pemeliharaan gedung, tenaga guru dan karyawan yang berstatus PNS ditanggung pemerintah. Namun secara keseluruhan kondisi ini belum merata, karena jumlah madrasah negeri tidak lebih dari 15% dari jumlah madrasah yang ada.

Problema yang lain adalah *raw input* dari peserta didik yang masuk madrasah dapat dikatakan nomor dua (2) atau sisa-sisa yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Ditambah lagi dengan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan anaknya di madrasah karena menganggap lembaga madrasah tidak menjamin *out put* yang berkualitas dalam mendidik putra-putri mereka. Hal ini, harus menjadi cambuk penyelenggara pendidikan untuk berbenah diri dalam mewujudkan madrasah yang berkualitas.

Solusi yang ditawarkan :

- a. Pemerintah mengusahakan Kementrian Pendidikan Agama tersendiri, terpisah dengan Kementerian Agama.
- b. Anggaran pendidikan ditingkatkan dengan memberikan bantuan dana yang tidak diskriminatif.
- c. Dana BOS dan BOM (Bantuan Operasional Madrasah) ditingkatkan.
- d. Insentif bagi guru ditingkatkan standar dengan UMR atau gaji PNS dengan tetap mengevaluasi kualitas kinerja dan profesionalisme guru.
- e. Program-program madrasah harus *upto date*, dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat atau dengan kata lain program sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. SDM yang Memadai Kurang Tersedia

- a. Kualitas guru yang masih rendah

Melihat Gambaran kondisi tenaga guru di madrasah saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, guru yang tidak layak/di bawah kualifikasi (*unqualified* atau *underqualified*). Artinya guru tersebut belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen . Misalnya untuk mengajar di MI, guru minimal berijazah D II, di MTs. D III atau S1 dan di MA Lulusan S1. *Kedua*, guru layak tapi salah kamar (*mismatch*). Artinya latar belakang pendidikannya tidak cocok dengan bidang studi yang diajarkannya. Misalnya lulusan Tarbiyah PAI mengajar IPA atau matematika, dan sebagainya. *Ketiga*, Guru yang layak atau sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai alternatif solusinya adalah :

- a. Pemerintah harus tetap memberikan bantuan beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya.

- b. Kerjasama yang solid antara kepala Madrasah, komite, stake holder dan pemerintah daerah.

3. *Kualitas Kepala dan Pengawas Madrasah yang Rendah*

Tidak jauh berbeda dengan dengan kualitas guru, maka kualitas tenaga kependidikan lain seperti kepala madrasah dan tenaga pengawas juga masih rendah. Secara formal kondisi di lapangan (madrasah), bahwa kepala madrasah cukup memadai, tetapi dari segi kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial masih sangat lemah, karena pada umumnya mereka adalah lulusan IAIN/Sejenisnya. Artinya dari segi dimensi pengetahuan keagamaan tidak diragukan lagi, akan tetapi, dari dimensi kemampuan leadership dan manajerial sangat lemah. Bahkan lebih parah lagi banyak kepala madrasah tersebut dari mantan pejabat administrative pada kandepag atau kanwil yang memperpanjang dinas aktifnya dengan mutasi menjadi pejabat fungsional kepala madrasah. Akibatnya banyak madrasah yang dikelola dengan penekanan aspek administrative daripada aspek dimensi akademis, yang terjadi adalah madrasah dikelola secara amatiran dan bernuansa sangat birokratis.

Kondisi yang sama pula terjadi pada mutu tenaga pengawas. Bukan rahasia lagi bahwa, sebagian besar tenaga pengawas madrasah adalah berasal dari tenaga administrative, seperti mantan kasi atau mantan kepala sekolah yang mutasi dalam rangka memperpanjang masa aktif. Dapat pula dibayangkan, kualitas pengawasan seperti apa yang dapat mereka lakukan. Dengan keterbatasan pemahaman tentang kegiatan pembelajaran, administrasi dan supervise pendidikan, dapat diperkirakan hasil pengawasan seperti apa yang dihasilkan.

Alternatif solusinya adalah :

- a. Kebijakan yang jelas untuk memperketat perekrutan kepala madrasah. Misalnya perlu ditetapkan kualifikasi administratif akademis, (harus background pendidikan), pengalaman mengajar yg cukup, integritas moral dan etika sosial kemasyarakatan yg mantap.
- b. Pengawas harus yang energik dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (tidak hanya dari kalangan pensiunan).
- c. Diklat bagi kepala madrasah dan pengawas secara kontinyu.
- d. Beasiswa bagi pengawasterus ditingkatkan.

4. Tantangan IPTEK dan Globalisasi

Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Karena IPTEK adalah keseluruhan pengetahuan yang didapat melalui pengamatan, rasional dan dilakukan pengujian secara kritis dan disepakati oleh para pakar dalam bidang ilmu. Dalam konteks ini, IPTEK memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Karena itu Tilaar, mengatakan bahwa, IPTEK bagaikan pedang bermata tiga: *Pertama*, ia emberikan terobosan-terobosan yang besar yang dapat menguak dunia baru yang penuh potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan manusia. *Kedua*, ia membuat terobosan baru bagi manusia terhadap rahasia alam semesta yang tidak atau belum terjangkau daya penalaran terbatas. *Ketiga*, ia telah menimbulkan kegoncangan-kegoncangan terhadap pegangan-pegangan hidup manusia seperti social, budaya, politik dan kepercayaan atau agama, sehingga dapat menghancurkan kehidupan manusia.²⁶

Kemajuan IPTEK berdampak positif dan negative. Oleh karena itu pengajaran IPTEK harus diberikan secara benar di lembaga-lembaga pendidikan madrasah, dengan

²⁶Depag RI, *Sejarah Madrasah : Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), 180.

mengajarkan konteks kulturalnya sehingga tidak terjadi dampak yang berbahaya bagi peserta didik.

Penyikapan madrasah yang menerima teknologi sebagai bagian dari pengajarannya adalah dalam rangka membangun kepribadian paripurna Islam yang mengambil dan menjabarkan konsep-konsep al-Quran tentang kemajuan peradaban.²⁷ Pesan-pesan al-Quran dalam bentuk pengajaran teknologi di madrasah ini menjadi sintesa tentang kebenaran bahwa umat Islam pun sebenarnya mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarahnya di masa lalu yaitu di masa renaissance Islam abad pertengahan.

Singkatnya, madrasah dalam arus perkembangan dan kemajuan IPTEK harus menjadi arena tempat anak didik belajar mengenal dan mencintai teknologi. Dan tanpa perlu bersikap apriori, madrasah pun dapat mendudukan keberadaan IPTEK secara proporsional. IPTEK dibutuhkan sebagai bagian dari tuntutan kehidupan modern yang tak terelakkan, yang bias dijadikan sarana untuk tumbuh dan tambahnya keimanan anak didik dan masyarakat Islam pada umumnya.

Hanya saja problema yang dihadapi terkait masalah teknologi adalah sarana prasarana belum sepenuhnya madrasah memiliki, guru dan tenaga pendidik lainnya sebagian besar masih buta dengan teknologi (Gaptek), akses teknologi hanya di wilayah perkotaan sehingga dipelosok-pelosok desa belum tersentuh. Walaupun bisa di akses, tetapi memerlukan biaya yang mahal.

Sebagai solusinya adalah :

- a. Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau mengadakan alat-teknologi yang diperuntukkan bagi madrasah. Walaupun program internet

²⁷Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung : Mizan, 1990), 67.

goes to school sudah berjalan, akan tetapi belum ada pemerataan sampai ke pelosok atau tempat terpencil.

- b. Diklat bagi guru dan tenaga pendidik untuk memahami teknologi.
- c. Bantuan pemerintah harus ditingkatkan.

E. Penutup

Berdasarkan kajian mendalam yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis madrasah di era modern antara lain Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah. Untuk mempertegas atau memperjelas diskripsi tentang madrasah itu, juga untuk meningkatkan nilai tawar, sering diikuti oleh istilah-istilah seperti terpadu, bertaraf internasional, unggulan dan sebagainya, yang masing-masing istilah itu memiliki standarisasi yang berbeda.

Madrasah semakin memperoleh tempat di hati masyarakat dan legitimasi dari pemerintah. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya, yang tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Persaingan madrasah dengan sekolah Islam antara lain persaingan dalam hal manajemen, menciptakan sosio-kultural lembaga, peningkatan kualitas dalam pendidikan umum dan mengkonstruksi hubungan dengan lembaga lain. Di antara problema yang dihadapi madrasah saat ini antara lain minimnya sarana prasarana, minimnya dana, sumber daya manusia yang belum optimal, akses teknologi yang belum memadai dan merata.*

BIBLIOGRAPHY

Ali, A. Mukti. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Arif, Mahmud. *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Idea Press, 2009.

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Depag RI. *Sejarah Madrasah : Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1993.
- Fadjar, A. Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan, 1999.
- _____. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Fajar Dunia, 1999.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung : Mizan, 1990.
- Lubis, Halfian. *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia*. Jakarta : Balitbang Depag RI, 2008.
- Maksum. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Saleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta : PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta : LP3ES, 1994.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1998.